

**IMPLEMENTASI PERDA NO.3 TAHUN 2018 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi Kasus di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan
Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

OLEH:

MASITA DEVI

178520065



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21

**IMPLEMENTASI PERDA NO.3 TAHUN 2018 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi Kasus di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan
Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

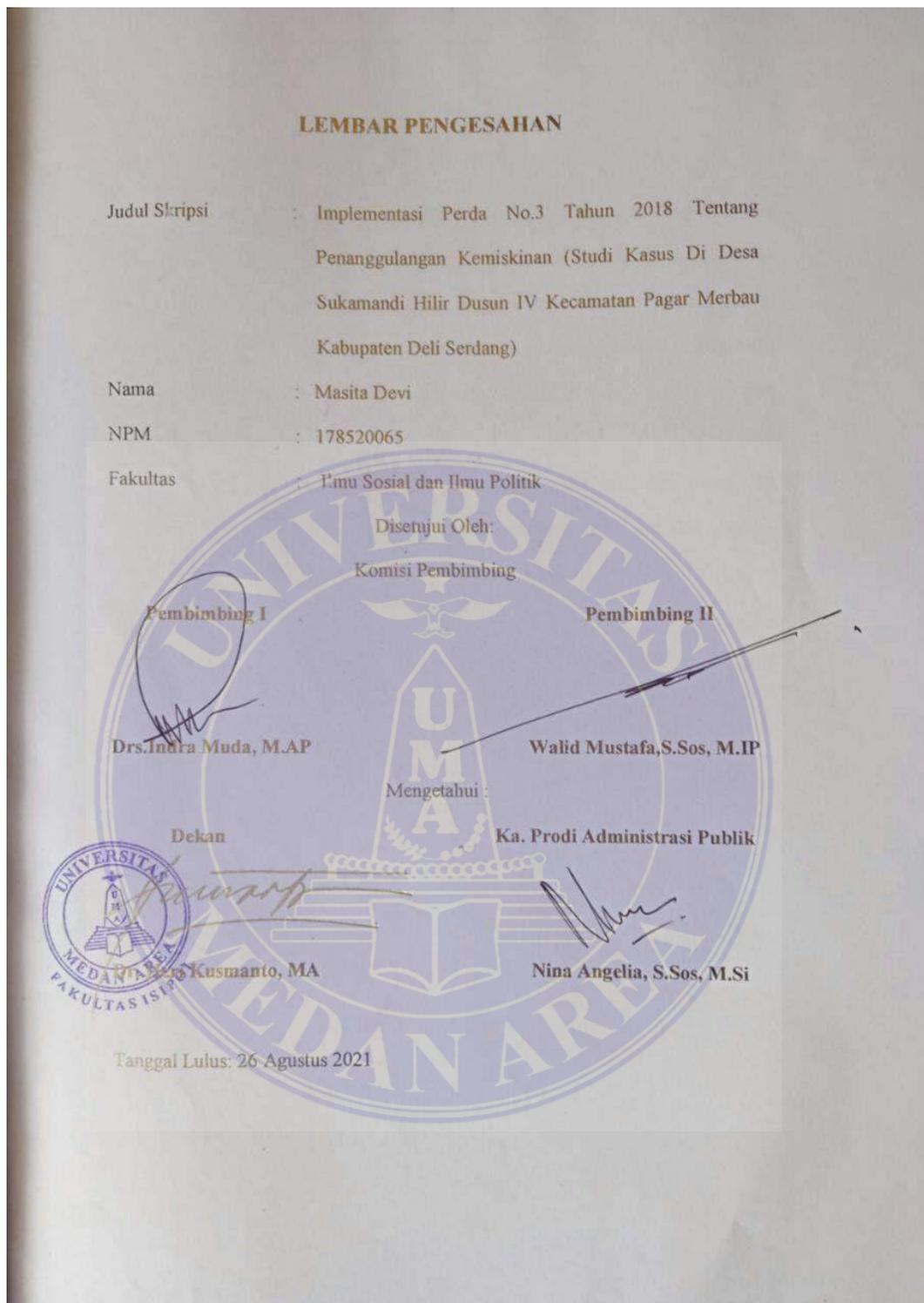
MASITA DEVI

178520065

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Agustus 2021



Masita Devi

17.852.0065

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masita Devi
NPM : 178520065
Program Studi : Administrasi Publik.
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

Yang menyatakan



(Masita Devi)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERDA NO.3 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dari program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan implementasi kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diuji validitasnya dengan menggunakan teknik pengujian triangulasi data. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa sukamandi hilir dusun IV berbasis bantuan dan perlindungan sosial. berdasarkan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan van Horn, Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV tidak berjalan maksimal karena kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaannya, hal tersebut juga menyebabkan beberapa program tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Kemiskinan, Implementasi, Penanggulangan Kemiskinan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PERDA NO. 3 OF 2018 CONCERNING POVERTY REDUCTION (Case Study in Sukamandi Hilir Village, Hamlet IV, Pagar Merbau District, Deli Serdang Regency)

Poverty alleviation is a policy of government and local government programs that are carried out systematically, planned, and in synergy with the business world and the community to reduce the number of poor people in order to improve the welfare of the people. This study aims to find out how the process of implementing policies on poverty reduction in Sukamandi Hilir Village is and to find out the inhibiting factors in implementing these policies. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, interviews and documentation review. The data that has been collected is then tested for validity using data triangulation testing techniques. Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The implementation of poverty alleviation policies in the Sukamandi village downstream, Hamlet IV, is based on social assistance and protection. based on the variables that affect the implementation of the policies proposed by Van Meter and van Horn, the Implementation of Perda no. 3 of 2018 concerning poverty alleviation in Sukamandi Hilir Village, Dusun IV did not run optimally due to a lack of communication and coordination in the implementation process, this also caused several programs not to be implemented properly.

Keywords: Poverty, Implementation, Poverty Alleviation.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 27 April 1999. Anak ke dua dari Ayahanda Suparno dan Ibunda Suwarni. Riwayat pendidikan penulis adalah SD Negeri 101785 Mabar, Mts Swasta Al-Washliyah 16 Perbaungan dan MA Swasta Al-Washliyah 12 Perbaungan.

Tahun 2017 penulis melanjutkan studi di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Jurusan Program Studi Administrasi Publik. Selama mengikuti perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Camat Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang serta melakukan penelitian dalam penyusunan Skripsi di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dengan judul skripsi “Implementasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)”.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi salah satu persyaratan kelulusan pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area dan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya bimbingan, arahan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat cinta dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyelesaian studi pada Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si, selaku Ka. Prodi Administrasi Publik.
3. Bapak Drs. Indra Muda, M. AP selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bantuan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Bapak Walid Mustafa, S.Sos., M.IP selaku Pembimbing II yang telah membantu saya memberikan motivasi, dukungan serta membimbing saya dalam penulisan sampai saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Hadiyanti Arini, S.Sos, MAP selaku Sekretaris yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan bimbingan, semangat dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Suherman selaku Kepala Desa Sukamandi Hilir dan Bapak Perdana F.Citra selaku Kepala Dusun Sukamandi Hilir Dusun IV serta masyarakat Sukamandi Hilir Dusun IV yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini
8. Untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Suparno dan Ibunda Suwarni atas pengorbanannya selama ini kepada penulis, baik dari segi materi maupun non materi serta atas segala untaian doa dan nasihat yang terbaik dan kasih sayangnya, motivasi, serta masukan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan selama perkuliahan terutama selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara perempuan saya Amalia Rama Dini beserta Suami, Saudara laki-laki saya Rinaldi, Ibu Saya Nuraini beserta Suami yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis.
10. Para sahabat yaitu Yuspita Prihartati, Siti Nurhaliza, dan Ayu Lestari beserta teman-teman seperjuangan Administrasi Publik stambuk 2017

khususnya Erika Putri, Rafiatul Hadawiyah, Maharani Iviola Aditya Damanik, Atikah Dwi Ramadhani, Erini Putria, Nurul Ufa Nainggolan dan teman-teman seluruh Fisip yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan pengalaman penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memenuhi kriteria dalam kelulusan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Medan, 26 Agustus 2021

Penulis

(Masita Devi)

178520065

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
RIWAYAT HIDUP.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Implementasi.....	4
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	4
2.1.2 Model Implementasi kebijakan.....	5
2.1.3 Unsur Unsur Implementasi Kebijakan.....	9
2.1.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	10
2.2 Peraturan Daerah.....	13
2.3 Kemiskinan.....	16
2.4 Penanggulangan Kemiskinan.....	20
2.5 Penelitian Terdahulu.....	22
2.6 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Waktu Penelitian.....	30
3.4 Informan Penelitian.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
4.1.2 Keadaan Geografi Desa Sukamandi Hilir.....	38
4.1.3 Keadaan Demografi Desa Sukamandi Hilir.....	39
4.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa Sukamandi Hilir.....	43
4.1.5 Kelembagaan Desa Sukamandi Hilir.....	44
4.1.6 Visi dan Misi Desa Sukamandi Hilir.....	46
4.1.7 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukamandi Hilir.....	47

4.2 Pembahasan	49
4.2.1 Implementasi Perda No.3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV	49
4.2.2 Apa Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV	58
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian	27
Bagan 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukamandi Hilir	48



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Nama Kepala Desa Sukamandi Hilir	37
Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin	39
Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	39
Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan pekerjaan.....	40
Tabel 5. Jumlah Penduduk berdasarkan keagamaan	42
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Desa Sukamandi Hilir.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian di negara Indonesia. Kemiskinan padadasarnya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Permasalahan kemiskinan merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang serius oleh pemerintah untuk dapat ditanggulangi.

Sejauh ini, pemerintah dengan berbagai upaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada namun hasil belum keseluruhan maksimal. Masih ada yang harus dengan tegas ditindak lanjuti agar penurunan kemiskinan di indonesia bisa nampak dengan kenyataannya. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan Perda nomor 3 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah warga miskin. Program penanggulangan kemiskinan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018, terdiri dari program berbasis keluarga, program berbasis pemberdayaan masyarakat, program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, dan program-

program lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Permasalahan yang umum terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan yaitu dimana program penanggulangan kemiskinan tersebut cenderung belum efektif, program pemerintah tidak mampu tersampaikan dan berjalan sinkron dengan masyarakat, Sumber Daya Manusia yang belum terkelola dengan baik sehingga dapat menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik di masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan masih bersifat semu dimana belum berbasis kemandirian sehingga belum melembaga pada masyarakat miskin.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015:228) bahwa “rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan sebuah data di lapangan”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.
2. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Perda No.3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang implementasi kebijakan dalam bidang pengentas kemiskinan.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah guna memperbaiki implementasi penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana atau alat untuk memperoleh hasil. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Menurut Indra Muda (2019:78) “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam Indra Muda (2019:78) “membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Menurut Wahab (2014:133) :

Implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik/privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Deddy Mulyadi (2016:24) “Implementasi merupakan suatu kebijakan yang berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dimana kegiatan tersebut mengalami sebuah perubahan atau transformasi yang bersifat multi organisasi”.

Daniel A.Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2014:135), menjelaskan:

Implementasi sebagai suatu aktivitas yang faktanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mampu mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

2.1.2 Model Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi. Van Meter dan Van Horn dalam Indra Muda (2019:87-98) Mengemukakan, suatu model dasar yang dilukiskan dalam enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*Performance*). Mereka menyatakan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik. Selain itu indikator-indikator yang memuaskan dapat dibentuk dan dikumpulkan. Dengan menggunakan

pendekatan masalah seperti ini, kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu cara yang semena-mena. Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna didalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2) Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Komunikasi didalam dan antar organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Oleh karena itu, implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

4) Karakteristik badan-badan pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi;
4. Vitalitas suatu organisasi;

5. Tingkat komunikasi-komunikasi;
 6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
- 5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang berlalu. Para peminat perbandingan politik negara dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

- 6) Kecenderungan pelaksana (*implementors*)

Setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan.

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil.

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn ini merupakan model yang menawarkan *blueprint* untuk menjelaskan dan menganalisa proses implementasi kebijakan dan karena itu, mengusulkan penjelasan-penjelasan bagi pencapaian-pencapaian dan kegagalan-kegagalan program. Studi implementasi menyadarkan para pembuat kebijakan kepada variabel-variabel yang dapat dimanipulasi untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan publik.

2.1.3 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu: unsur pelaksana, adanya kebijakan yang dilaksanakan dan target group atau kelompok sasaran.

a. Unsur pelaksana

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik dalam setiap tingkat pemerintahan. Unit-unit administrasi atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang

bertalian dengan proses kebijakan publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan ia memiliki diskresi mengenai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan.

b. Kebijakan

Kebijakan ialah suatu keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk dapat mengatasi permasalahan tertentu ialah sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan pedoman perilaku dalam pengambilan sebuah keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik itu kelompok sasaran ataupun (unit) suatu organisasi pelaksana kebijakan, penerapan atau juga pelaksanaan dari suatu kebijakan yang sudah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana ataupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

c. Sasaran (Target Group)

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

2.1.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut *Turner* dan *Hulme* dalam Pasolong (2016:59) dalam praktiknya, implementasi kebijakan mengalami hambatan yang berasal dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal):

a. Hambatan dari dalam (faktor internal), dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur

organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan sistem dan prosedur yang digunakan.

- b. Hambatan dari luar (faktor eksternal), dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

Menurut Bambang Sunggono (1994 : 149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

- b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat

berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan- pembatasan yang kurang jelas.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono(1994 : 144-145) , faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;

- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok- kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

2.2 Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi :

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas:

- a. kejelasan tujuan. “bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat “bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.
- d. dapat dilaksanakan “bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan “bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- f. Kejelasan rumusan “bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.

- g. Keterbukaan “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

2.3 Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi suatu standar hidup tertentu. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty treshold*).

Menurut Adji,ddk (2020:9) :

Kemiskinan sebagai kondisi ketika taraf hidup seseorang dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan. Menurut sifatnya, kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan sementara (*transient poverty*) dan kemiskinan kronis (*chronic poverty*). Penduduk yang tergolong miskin sementara adalah mereka yang pengeluaran rumah tangganya berada di bawah garis kemiskinan. Mereka menjadi miskin karena perekonomian

secara umum memburuk sehingga pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan minimumnya. Kelompok penduduk ini akan tergolong tidak miskin jika kondisi perekonomian membaik karena mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang memberikan penghidupan lebih baik.

Nugroho dan Dahuri (2012: 184) menjelaskan :

Secara konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Sementara kemiskinan relatif, memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lain yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi.

Menurut Arsyad (2010:300) “kemiskinan dapat terjadi karena anggota masyarakat tidak atau belum berpartisipasi dalam proses perubahan yang disebabkan ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi atau kualitas yang kurang memadai”.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Menurut Suryawati (2005:122) Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

- c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Nasikun dalam Suryawati (2005:123), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan

seperti deret hitung.

- d. *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The marginalization of women*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. *Exploatif inetrmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
- i. *Ineternal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *International process*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

2.4 Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Setiowati (2018:3) “Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”.

Syaparuddin (2015:58) mengemukakan :

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut mencakup upaya baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendampingan usaha.

Pada tahun 2010, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Sahdan (2005:65) mengungkapkan bahwa secara umum, program strategis yang dapat dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan adalah:

- a. Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi.

- b. Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin. Kemiskinan memiliki sifat multidimensional, maka penanggulangannya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan.
- c. Kebijakan dan Program yang Melindungi Kelompok Miskin. Kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap guncangan internal (misalnya kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK) maupun guncangan eksternal (misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial), karena tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi guncangan-guncangan tersebut.
- d. Kebijakan dan Program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi, hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan.
- e. Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat desa dapat menanggulangi sendiri kemiskinannya.

Menurut Nurhadi (2007: 40-41), dijelaskan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan terdapat 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. Pilar pertama, yaitu perluasan kesempatan kerja dimaksudkan sebagai menciptakan suasana dan lingkungan ekonomi makro, pemerintahan, dan pelayanan publik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Pilar kedua, yaitu pemberdayaan masyarakat mengandung maksud bahwa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga mampu untuk mandiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin.
3. Pilar ketiga, yaitu peningkatan kemampuan/ human capital dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin baik individual/ kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar dan mampu mengadaptasi terhadap perkembangan lingkungannya (ekonomi dan sosial).
4. Pilar keempat, yaitu perlindungan sosial memiliki makna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang rentan (vulnerable), misalnya pengemis, lansia, anak-anak terlantar, yatim piatu, penderita cacat, korban bencana alam, korban konflik sosial, serta mereka yang terkena dampak krisis ekonomi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ialah :

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tontowi dalam Tesis yang berjudul “Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Desa Purbayana Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”. Hasil penelitian menunjukkan Proses implementasi Program P2KP di desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan sesuai dengan standar aturan yang ditetapkan yaitu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Keseluruhan tahapan-tahapan telah dilakukan sesuai dengan juklak. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana pada aturan pelaksanaan yang ada. Namun demikian selama pelaksanaan masih terjadi hal-hal yang belum sesuai dengan harapan, sehingga hasil yang diperoleh pun juga belum bisa maksimal, karena disebabkan oleh berbagai hal. Diantaranya adalah keterbatasan dalam hal petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah menyebabkan keseluruhan proses perencanaan hingga pelaporan terlihat belum memperoleh hasil yang diharapkan. Demikian juga dengan munculnya berbagai hambatan juga diidentifikasi sebagai faktor yang menjadikan proses implementasi belum memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Secara lebih terperinci maka hasil penelitian tersebut dikemukakan sebagai berikut : Dari keseluruhan tahapan yang harus dilalui mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, pelestarian dan pelaporan, meski sudah dilaksanakan, namun masih ditemukan yang belum dilaksanakan secara optimal. Tahap pelestarian misalnya belum bisa

dilaksanakan mengingat berbagai keterbatasan yang ada seperti keterbatasan sumber dana, mengingat swadaya yang dilakukan oleh warga sebagian besar hanya berupa bantuan tenaga. Sejumlah hambatan ditemukan dalam proses implementasi program P2KP ini. Diantaranya adalah hambatan ketidakjelasan tentang aturan pelaksanaan, hambatan komunikasi, hambatan sumber daya khususnya dana, hambatan sikap pelaksana yang cenderung subjektif serta hambatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian berbagai hambatan tersebut dalam pelaksanaannya telah bisa diatasi dengan baik. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi program penanggulangan kemiskinan perbedaannya adalah studi kasus yang diambil serta lokasi dan waktu penelitian.

2. Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syafaruddi, Searmi, dan Nurhayani yang berjudul “Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Batang Hari” dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Batang Hari ini dapat digunakan oleh semua Dinas/Instansi dan Pemerintahan Desa di lingkup Pemerintahan Kabupaten Batang Hari dengan ketentuan:
 - a. Menjabarkan secara detail kegiatan-kegiatan yang ada dalam bentuk langkah-langkah kegiatan.
 - b. Setiap rencana kegiatan harus didahului dengan studi kelayakan, analisa kebutuhan dan sosialisasi.
 - c. Setiap perencanaan kegiatan harus dilengkapi dokumen UKL/UPL atau AMDAL bagi Kegiatan yang berdampak penting terhadap perubahan

lingkungan Hidup.

- d. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker terkait harus memperhatikan prinsip KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergis)
- e. Setiap penjabaran langkah kegiatan harus memperhatikan permasalahan mendasar yang ada dan indikator tujuan, sehingga hasil akhir dari kegiatan tersebut dapat menjawab permasalahan mendasar yang ada.
- f. Dilakukan review setiap tahun terhadap strategi penanggulangan kemiskinan daerah ini, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan.

Pelaksanaan semua kegiatan dalam strategi Penanggulangan kemiskinan ini, bukan berarti akan menyelesaikan semua permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Batang Hari. Karena permasalahan kemiskinan, bukan permasalahan sederhana tetapi permasalahan yang multi kompleks yang harus ditangani secara holistik dan simultan serta terus menerus, termasuk sikap hidup keluarga miskin yang ingin keluar dari kemiskinan. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan perbedaannya adalah studi kasus yang diambil serta lokasi dan waktu penelitian.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan. Menurut Uma Sekaran dalam Harbani Pasolong (2016:83) “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang urgen. Jadi, kerangka pemikiran akan muncul apabila suatu penelitian memperkuat dua variabel atau lebih”.

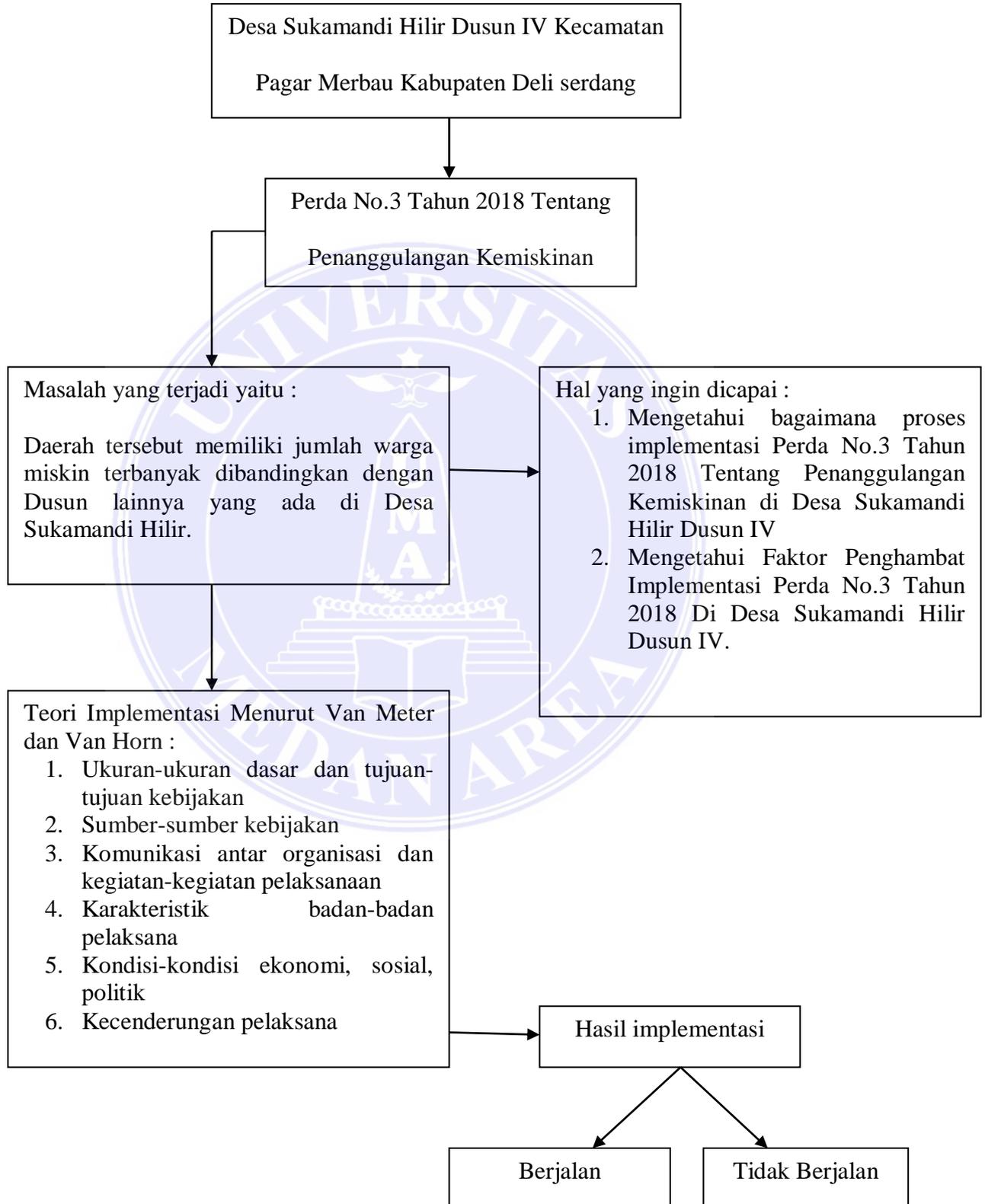
Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai Implementasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, yang mana daerah tersebut memiliki jumlah warga miskin terbanyak dibandingkan dengan dusun lainnya yang ada di Desa Sukamandi Hilir. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana proses implementasinya maka diidentifikasi kondisi faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Indra Muda (2019:87), yaitu :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
4. Karakteristik badan-badan pelaksana
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
6. Kecenderungan pelaksana (*implementors*)

Dari faktor-faktor dan variabel-variabel diatas, maka dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berjalanya suatu implementasi dengan membantu atau sebaliknya dapat menghambat berjalannya suatu implementasi kebijakan sehingga dapat dipengaruhi sebagai referensi implementasi tahap berikutnya. Hasil dari Implementasi Perda Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang tidak berjalan maksimal disebabkan masih banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya.

BAGAN 1

KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dimana pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan keadaan objek penelitian, berdasarkan fakta – fakta yang kelihatan dilapangan sebagaimana adanya. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan berbagai data yang dihimpun, kemudian dihimpun setelah itu dianalisis kemudian bergerak kearah kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dimana metode yang digunakan peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis suatu kejadian atau peristiwa sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu Implementasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Strauss dan Corbin 1997 dalam buku Jusup Soewadji (2012:51) “Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan - penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur -prosedur atau cara – cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)”.

Mulyana (2001: 150) mengungkapkan bahwa “penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif”.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan Dan Taylor (dalam Imam Gunawan, (2015:82) adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara *holistic*(utuh)”.

Menurut Sugiyono (2015 : 21) Karakteristik penelitian Kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung kesumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian untuk menentukan lokasi penulis mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penulis memilih lokasi penelitian adalah di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena Desa Sukamandi Hilir Dusun IV termasuk desa yang

memiliki jumlah warga miskin terbanyak diantar desa lain yang ada di Sukamandi Hilir. Walaupun sudah diterapkannya Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, namun jumlah warga di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV tidak mengalami perubahan. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana proses implementasi Perda No.3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV dan apa saja hambatan yang menyebabkan jumlah warga miskin di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV tidak mengalami penurunan.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Februari sampai Maret, 1 bulan pengumpulan data dan 1bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi data dan proses bimbingan berlangsung.

3.4 Informan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian informan memiliki peranan yang penting dalam pengambilan data atau informasi. Menurut (Hendarso dalam Suyanto 2005: 171 – 172) Informan penelitian ada tiga macam, yaitu informan kunci (*key informan*), informan utama atau umum (*general informan*) dan informan tambahan.

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Bapak Suherman selaku Kepala Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

2. Informan utama atau umum (*general informan*), adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu Bapak Perdana F.Citra selaku Kepala Dusun Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu Ibu Lestari dan Ibu Ningsih yang merupakan masyarakat Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang akan menjadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dapat berupa sebuah informasi yang didapatkan sebuah peneliti dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang dilakukan di lapangan sehingga hasil maupun kesimpulan tidak diragukan lagi kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2015 : 222) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Jenis - jenis teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mendapatkan informasi yang jelas melalui pengamatan panca indra dan merasakan maupun memahami suatu objek yang diteliti. Menurut Nasution 1998 dalam Sugiyono (2015:223) “Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Dimana sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui pengamatan secara langsung ke objek penelitian”.

Menurut David, dkk (2016:17) :

Bahwa pemahaman yang lebih baik tentang konteks hal yang diteliti. Memungkinkan peneliti untuk lebih membuka wawasan, terbuka, tidak dipengaruhi berbagai konseptualisasi yang ada sebelumnya. Peneliti dapat melihat hal-hal yang oleh responden kurang disadari. Memperoleh data yang tidak diungkap dalam wawancara. Observasi memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukannya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan sebuah informasi yang tepat dan akurat. Menurut Esterberg 2002 dalam Sugiyono (2015:231) “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian, dengan cara Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang dapat dikatakan bahwa pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan yang diwawancarai disebut *interview*.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:239) “Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menyediakan dokumen - dokumen, dimana dokumen - dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya - karya monumental dari seseorang”. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

Menurut Burhan Bungin dalam Imam Gunawan (2015:176)“Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis”.

Guba dan Lincoln dalam Imam Gunawan (2015: 176) menjelaskan :

Istilah dokumen yang dibedakan dengan *record*. Definisi dari *record* adalah setiap pernyataan tertulis oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akuntin. Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah suatu proses pembuktian yang akurat untuk pengumpulan data dalam penelitian, baik itu yang bersifat tertulis, gambar, karya – karya, maupun buku.

4. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan atau menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. Sugiyono (2018:372) mengemukakan bahwa “Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahaan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Triangulasi menurut Tohirin (2011:73-74) membedakan empat macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi sumber, caranya antara lain : (1) membandingkan data hasil dengan data hasil wawancara. (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa dikatakan secara pribadi. (3) membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah, menengah, dan tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan. (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan metode. Caranya adalah : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan penelitian. Caranya adalah dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan membandingkan hasil pekerjaan seseorang analisis lainnya dalam konteks yang berkenaan.
4. Triangulasi dengan teori, makna lainnya adalah dengan penjelasan banding (*rival explanation*).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Sugiyono (2015: 369-374) Aktivitas dalam analisis data meliputi : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah salah satu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal –hal yang pokok, memfokuskan pada hal –hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah salah satu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. penyajian data biasanya dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing /Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

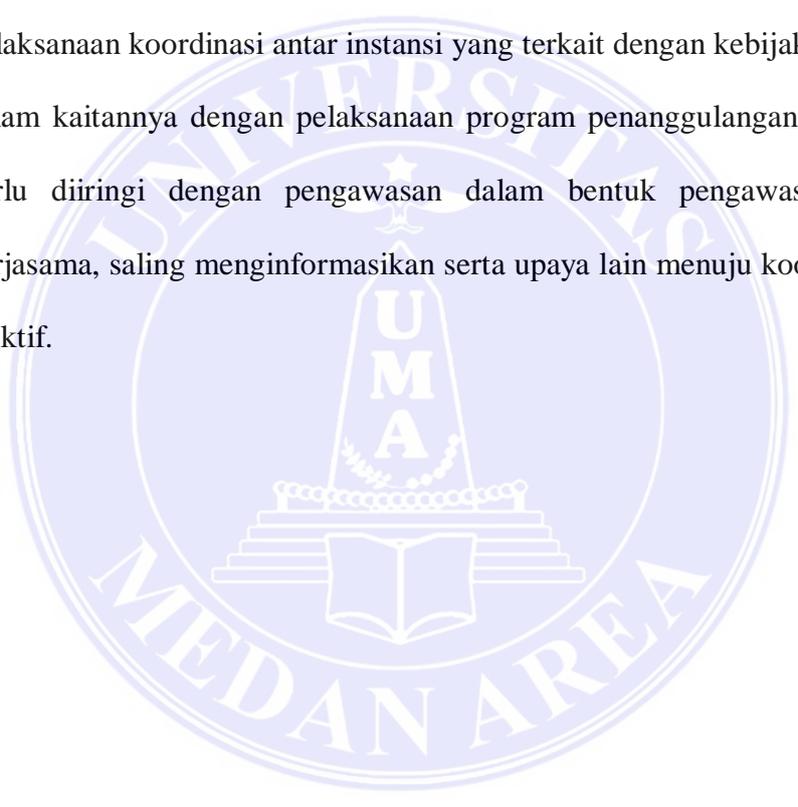
Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan , maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV memiliki banyak kekurangan dalam prosesnya. kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang efektif, dan koordinasi yang kurang baik antara para pelaksana dalam mengimplementasi kebijakan tersebut menyebabkan program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Perda No.3 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir diantaranya: komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dengan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan sehingga masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif dalam pengimplementasian kebijakan tersebut dan kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dalam kebijakan tersebut menyebabkan pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlaksana dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang akan di berikan oleh penulis ialah:

1. Perlu adanya sosialisasi langsung tentang program-program penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi mensukseskan setiap program yang ada.
2. Pelaksanaan koordinasi antar instansi yang terkait dengan kebijakan, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, perlu diiringi dengan pengawasan dalam bentuk pengawasan berlapis, kerjasama, saling menginformasikan serta upaya lain menuju koordinasi yang efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arsyad. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan STIM YKPN.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muda, I. (2019). *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada Medan.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik & Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyana, D. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho dan Dahuri. (2012). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Nurhadi. (2007). *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

----- (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, B. (1994). *Hukum dan kebijakan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Tohirin. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jurnal :

Adji, dkk. (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia. *TNP2K*, 9.

David, dkk. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. *Buku Ajar Universitas Udayana*, 17.

Sahdan, G. (2005). Menanggulangi Kemiskinan Desa. *Artikel-Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan* , 65.

Setiowati, E. (2018). Faktor-Faktor Pendorong Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Siak dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. *JOM* , 3.

Suryawati. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK* , 122-123.

Syaparuddin. (2015). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Batang Hari). *Pradigma Ekonomika* , 265.



LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian

Gambar 1

Kantor Desa Sukamandi Hilir



Gambar 2

Foto Bersama Informan Utama

1. Nama : Suherman
Alamat :Desa Sukamandi Hilir Dusun 1
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Usia : 40 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Sukamandi Hilir Dusun 4



(Pada hari Selasa, 16 Februari 2021 di Kantor Desa Sukamandi Hilir)

Gambar 3

Foto Bersama Informan Utama

2. Nama : Perdana F. Citra
Alamat : Desa Sukamandi Hilir Dusun 4
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Usia : 38 Tahun
Jabatan : Kepala Dusun Sukamandi Hilir Dusun 4



(Pada hari Senin, 22 Februari 2021 di Kantor Desa Sukamandi hilir)

Gambar 4

Foto Bersama Informan Tambahan sebagai Masyarakat Desa Sukamandi Hilir Dusun IV

1. Nama : Ningsih
Alamat : Desa Sukamandi Hilir Dusun 4
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 76 Tahun
Pekerjaan : -



(Pada hari Minggu, 28 Februari 2021 di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV)

2. Nama : Lestari
Alamat : Desa Sukamandi Hilir Dusun 4
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 28 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



(Pada hari Minggu, 28 Februari 2021 di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV)